

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

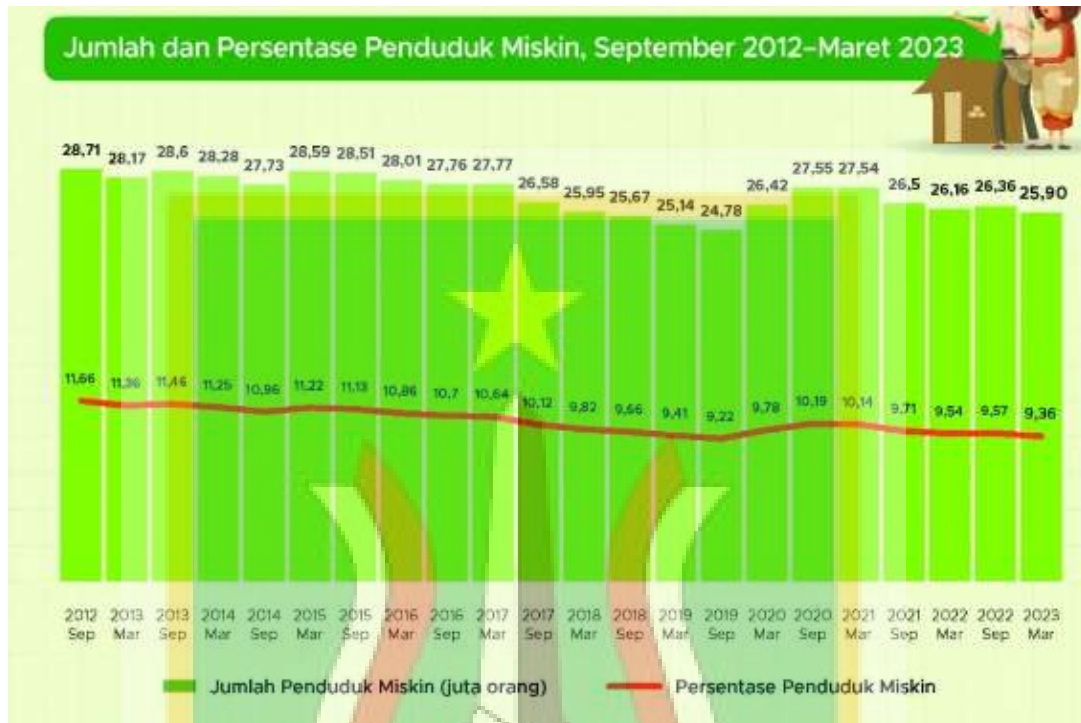
Setiap negara pasti menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda, khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang mendalam dan kompleks yang dapat ditemukan di hampir setiap negara di dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Namun, tingkat permasalahan kemiskinan di masing-masing negara bisa sangat berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi masalah yang sangat mendesak dan perlu segera ditangani, karena dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi negara. Kemiskinan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan ini dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, seperti memperluas peluang kerja, meningkatkan sektor pertanian, memberikan bantuan dana bergulir untuk pengusaha kecil, dan memperbaiki infrastruktur di berbagai daerah. Meski demikian, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masalah kemiskinan di Indonesia masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan jauh lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik serta berkelanjutan. Kemiskinan yang masih terjadi hingga saat ini menjadi hambatan besar bagi pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Penyebab utama kemiskinan ini sangat beragam, termasuk rendahnya pendapatan masyarakat, keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif yang dapat mendukung kehidupan yang lebih baik, serta kekurangan dalam hal gizi, kesehatan, dan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara.

Selain itu, kemiskinan di Indonesia juga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki akses terbatas untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka karena terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk berkembang. Mereka sering kali terpinggirkan dari kegiatan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Keterbatasan akses ini membuat mereka tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lainnya yang memiliki lebih banyak kesempatan dan potensi untuk berkembang. Dalam laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,41% dari total populasi Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan 529,9 ribu orang dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, namun jumlah tersebut masih terbilang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu dilakukan lebih intensif.

Penurunan jumlah penduduk miskin yang tercatat sebesar 805,1 ribu orang pada periode tersebut menunjukkan adanya perbaikan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, masalah kemiskinan tetap menjadi persoalan yang belum bisa sepenuhnya diselesaikan. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diatasi karena faktor-faktor struktural, seperti kurangnya pendidikan yang memadai, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini semakin memperburuk kualitas hidup mereka dan memperpanjang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan mengembangkan kebijakan yang dapat menyentuh akar permasalahan kemiskinan ini, agar di masa depan, setiap warga negara Indonesia dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Gambar 1.1
Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di
Indonesia 2012-2013



Sumber data: BPS

Berdasarkan data yang ada, diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui kebijakan, contohnya seperti implementasi program pembangunan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah persoalan sosial ekonomi, khususnya terkait dengan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kemampuan dalam merancang serta menerapkan strategi yang tepat guna mengatasi problematika tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga adalah dengan diluncurkannya Program Keluarga Harapan (PKH). Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, program ini merupakan kebijakan pemerintah yang menyediakan bantuan sosial dengan syarat tertentu kepada individu maupun keluarga yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

PKH dirancang sebagai langkah dalam membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini mulai diterapkan sejak tahun 2007 dan, sebagaimana dilaporkan oleh Republika.co.id, keberadaannya turut berkontribusi dalam mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Terdapat lima pilar utama SDGs yang mendapat dukungan dari PKH, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan, peningkatan akses terhadap pendidikan dasar yang inklusif, kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu. PKH juga merupakan skema bantuan tunai bersyarat yang mensyaratkan keterlibatan penerima manfaat dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2012:19).

Dalam jangka panjang, tujuan PKH ini untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mengubah pola perilaku rumah tangga miskin (RTM) yang selama ini kurang mendukung peningkatan kesejahteraan mereka (Amelia, 2020). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos.go.id), PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Program perlindungan sosial ini, yang secara global dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT), telah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan, terutama dalam menangani kemiskinan kronis di berbagai negara. Selain itu, cakupan manfaat dari PKH kini semakin diperluas untuk mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan tujuan memastikan mereka tetap memiliki taraf hidup yang layak sesuai dengan amanat konstitusi serta visi Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga yang tergolong miskin diberikan dorongan untuk memperoleh akses serta memanfaatkan layanan sosial dasar seperti pangan, gizi, kesehatan, pendidikan, perawatan, dan pendampingan, serta termasuk dalam program lainnya. PKH telah diterapkan di sejumlah provinsi

di Indonesia, salah satunya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang meskipun merupakan wilayah perkotaan, masih mencatatkan jumlah penduduk miskin yang cukup besar, yaitu sekitar 477,83 ribu jiwa atau 4,44% dari total populasi Indonesia (BPS, 2023). Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis DKI Jakarta yang mayoritas adalah wilayah perkotaan, yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung dinilai berdasarkan faktor materi atau keuangan, sehingga angka kemiskinan di kawasan perkotaan lebih tinggi. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, mengungkapkan bahwa kemiskinan ekstrem didefinisikan apabila pendapatan per kapita seseorang kurang dari Rp11.633 per hari. Berikut adalah presentase jumlah penduduk miskin menurut kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Persen)	
	2022	2023
Kep Seribu	14,11	13,13
Jakarta Selatan	3,52	3,10
Jakarta Timur	4,30	4,20
Jakarta Pusat	4,90	4,68
Jakarta Barat	4,22	4,09
Jakarta Utara	7,24	6,78
DKI Jakarta	4,69	4,44

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS

Kemudian pada Laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) tahun 2021, dijelaskan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan sosial melalui PKH di Jakarta Timur. Ditemukan bahwa masih ada sejumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan dan seharusnya menerima manfaat tersebut, namun belum terdaftar sebagai penerima. Selain itu, terdapat individu yang sudah memiliki Kartu

Kesejahteraan Sosial (KSS) dan sebelumnya telah menerima bantuan. Berikut adalah jumlah penerima PKH di Jakarta Timur pada tahun 2022.

Gambar 1.3

Jumlah Penerima PKH Kota Jakarta Timur Tahun 2022



Sumber: Suku Dinas Sosial Jakarta Timur

Berdasarkan data yang tersedia, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur mencatat bahwa Kecamatan Kramat Jati merupakan salah satu wilayah yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2022, jumlah keluarga yang terdaftar sebagai penerima program ini mencapai 1.873 kepala keluarga. Program PKH sendiri telah diimplementasikan di kecamatan ini sejak tahun 2010. Namun, dalam realisasinya di lapangan, masih terdapat masyarakat yang berada dalam kategori kurang mampu atau prasejahtera, sementara alokasi dana bantuan belum sepenuhnya tersalurkan dengan baik.

Kemudian, berdasarkan informasi dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses penetapan serta distribusi bantuan sosial, seperti PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST). Ketidaktepatan tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp6,93 triliun. Permasalahan ini dipicu oleh keberadaan sejumlah penerima manfaat (KPM) yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober

2020. Selain itu, terdapat usulan dari pemerintah daerah yang diajukan melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), namun data yang dimasukkan tidak valid.

Tidak hanya itu, beberapa penerima bantuan yang seharusnya tidak lagi terdaftar pada tahun 2020 masih tercatat sebagai penerima manfaat pada tahun 2021. Bahkan, ditemukan pula individu yang telah dinonaktifkan dari daftar penerima, termasuk mereka yang telah meninggal dunia maupun memiliki data ganda. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan proses distribusi bantuan sosial, seperti PKH, BPNT/Sembako, dan BST, menjadi tidak efektif dan kurang tepat sasaran. Akibatnya, negara mengalami potensi kerugian dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp6,93 triliun.

Kemudian Kecamatan Kramat Jati merupakan salah satu kecamatan dengan memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dimana menurut data BPS Jakarta Timur kecamatan ini memiliki luas wilayah 13,00 Km². Dengan total jumlah penduduk 162.822 Jiwa. Jumlah kepadatan penduduk bisa dilihat dengan menggunakan rumus :

Kepadatan=Jumlah Penduduk/Luas wilayah km

Contoh Perhitungan

1. Jika luas kecamatan adalah 100 km²:
 - Kepadatan = 200,000/100=2,000 jiwa/km²
2. Jika luas kecamatan adalah 50 km²:
 - Kepadatan = 200,000/50=4,000 jiwa/km²
3. Jika luas kecamatan adalah 20 km²:
 - Kepadatan = 200,000/20=10,000 jiwa/km²

Kesimpulan

- Kecamatan dengan luas kecil (misalnya <50 km²):
200 ribu jiwa akan sangat padat (4,000 - 10,000 jiwa/km²).
- Kecamatan dengan luas besar (misalnya >100 km²):
200 ribu jiwa bisa dianggap sedang (2,000 jiwa/km²).

\

Kecamatan Kramat Jati memiliki luas wilayah 13,00 km² dengan total jumlah penduduk 162.822 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan perkotaan, terutama jika tidak diimbangi dengan akses yang memadai terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya kemiskinan masih ditemukan pada etnis Betawi di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, yang ditandai dengan sikap pasrah terhadap keadaan ekonomi dan kurangnya motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan

Maka dari itu Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkembang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Evaluasi terhadap PKH penting dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa program ini tepat sasaran serta memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

Memilih Kecamatan Kramat Jati sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa faktor:

- **Kepadatan Penduduk:** Dengan jumlah penduduk yang tinggi, kecamatan ini menghadapi tantangan dalam distribusi sumber daya dan layanan, yang dapat mempengaruhi efektivitas program sosial seperti PKH.
- **Budaya Lokal:** Adanya budaya kemiskinan pada komunitas tertentu di wilayah ini menunjukkan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk program pengentasan kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, evaluasi PKH di Kecamatan Kramat Jati diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program ini dalam konteks perkotaan dengan karakteristik spesifik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana efektivitas, efisiensi, ketepatan, serta pemerataan Program PKH, Hal ini yang memotivasi peneliti untuk memilih penelitian ini dengan judul “**Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam**

Memberikan Dukungan Kebutuhan Hidup Yang Layak Pada Masyarakat Kecamatan Kramat Jati”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dikaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah penelitian diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut untuk mengurangi atau mengatasi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Kajian ini akan menambah wawasan serta memperkaya literatur dalam dunia akademik, terutama terkait kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan dalam praktik nyata, antara lain:

1. Memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat, khususnya dalam dunia pendidikan.

2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai Program Keluarga Harapan serta menjadi referensi dalam penyusunan karya ilmiah, yang sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pembuka dalam penyusunan proposal penelitian. Di dalamnya, peneliti akan menguraikan dasar permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, merumuskan inti permasalahan yang akan dikaji, serta mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, bab ini juga mencakup manfaat yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memaparkan landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam penelitian. Di dalamnya terdapat definisi, konsep, serta teori yang mendukung, disertai referensi dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, bab ini juga mengulas hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Peneliti akan menjelaskan teknik pengolahan serta analisis data, lokasi tempat penelitian dilakukan, serta metode yang diterapkan dalam proses penelitian ini.

BAB IV

: PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan deskripsi serta analisis terkait penelitian mengenai "Evaluasi Program Keluarga Harapan

(PKH) Pada Masyarakat Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur" Pembahasan akan dilakukan secara mendalam guna memahami sejauh mana program ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini berisi kesimpulan dan saran

